RENJA KOMNAS HAM

TA.2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Jakarta, 1 Juni 2015

Nomor : 117 /SES/VI/2015
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rencana Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Renja Komnas HAM) Tahun 2016

Yth. 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bappenas
di-
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0082/M.PPN/04/2015 dan S-288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 Perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, sehubungan dengan hal tersebut kami menyusun Rencana Kerja Komnas HAM Tahun berdasarkan alokasi Pagu Indikatif Kementerian / Lembaga Tahun 2016 dengan perincian sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran 2016	
3332	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Rp	13.520.000.000.00,-
3333	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Rp	7.430.000.000.00,-
3334	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Rp	4.120.000.000.00,-
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	Rp	3.070.000.000.00,-
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per-UU dan Bantuan Hukum	Rp	65.816.100.000.00,-
Jumlah		**Rp**	**93.956.100.000.00,-**
Terbilang : Sembilan puluh tiga miliyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah			

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Sekretaris Jenderal,

Untung Tri Basuki. SH., SPN
NIP. 195907181986031001

Tembusan :
1. Ketua Komnas HAM
2. Arsip

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. VISI : Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan

3. MISI : 1.Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;

2.Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;

3.Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
001	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia			25.070,0
		Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat	3	
		Jumlah rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM	3898	
		Jumlah rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan per-UU-an yang berperspektif HAM	5	
		Presentase instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	10%	
002	Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjend Komnas HAM			68.886,1
		Prosentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal	15%	
		Prosentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	
		Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	80	
		Opini laporan keuangan	WTP	
		Nilai akuntabilitas kinerja	CC	
Jumlah				93.956,1

5. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	68.886,1	0,0	0,0	0,0	68.886,1	0,0	0,0	0,0
06	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	25.070,0	0,0	0,0	0,0	25.070,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah		93.956,1	0,0	0,0	0,0	93.956,1	0,0	0,0	0,0

Jakarta,01 Juni 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki

NIP. 195907181986031001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Sasaran Strategis : 1.Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjend Komnas HAM

3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

4. Unit Organisasi : Komnas HAM

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
01	Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM			68.886,1
		Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal	15%	
		Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	
		Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80	
		Opini laporan keuangan	WTP	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	
Jumlah				**68.886,1**

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaanaan, Pengawasan dan Kerjasama	3.070,0	0,0	0,0	0,0	3.070,0	0,0	0,0	0,0
3336	Penyelenggarsan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	65.816,1	0,0	0,0	0,0	65.816,1	0,0	0,0	0,0
Jumlah		**68.886,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68.886,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Jakarta,01 Juni 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki
NIP.195907181986031001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2. Sasaran Strategis : 1.Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
3. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
4. Unit Organisasi : Komnas HAM

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)
01	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia			25.070,0
		Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat	3	
		Jumlah rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM	3896	
		Jumlah rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM	5	
		Persentase instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	10%	
Jumlah				25.070,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2016					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2017	2018	2019
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	7.430,0	0,0	0,0	0,0	7.430,0	0,0	0,0	0,0
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	13.520,0	0,0	0,0	0,0	13.520,0	0,0	0,0	0,0
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	4.120,0	0,0	0,0	0,0	4.120,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah		25.070,0	0,0	0,0	0,0	25.070,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta,01 Juni 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki
NIP.195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia

4. Kegiatan : Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

5. Unit Organisasi : Biro Dukungan Pemajuan HAM

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO	Sasaran Kegiatan(Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)	Dimensi	Bidang	Nawacita	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01	Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia		14	2.000,0				---
		Jumlah kajian, penelitian dan rekomendasi terkait kebijakan dan implementasi HAM di Indonesia	14					
02	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia		25	5.430,0			09	---
		Jumlah diseminasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan implementasi HAM di Indonesia	25					
Jumlah				**7.430,0**				

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia	14		2.000,0	14	14	15	0,0	0,0	0,0
	Jumlah rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan per-UU yang berperspektif HAM	5	200,0	1.000,0						
	Prosentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi	20	10,0	200,0						
	Jumlah kajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan	2	100,0	200,0						
	Jumlah dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun	2	200,0	400,0						
	Jumlah advokasi terhadap usulan mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UU yang berperspektif HAM	5	40,0	200,0						

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
02	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia	25		5.430,0	30	35	40	0,0	0,0	0,0
	Prosentase instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	10	17,4	174,0						
	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti diklat TOT terkait HAM	60	16,7	1.000,0						
	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan diseminasi HAM	500	4,6	2.312,5						
	Jumlah materi kampanye publik tentang HAM	43	33,2	1.428,4						
	Jumlah penyusunan kurikulum pendidikan HAM	1	167,1	167,1						
	Jumlah kerjasama di bidang pemajuan HAM dengan institusi/lembaga lain	7	49,7	348,0						
Jumlah				**7.430,0**	**44**	**49**	**55**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

B. Sumber Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
01	Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia		2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	
	Jumlah rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan per-UU yang berperspektif HAM	BLK	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
			1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah kajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah dokumen indeks HAM (HRI) yang tersusun	BLK	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	
			400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah advokasi terhadap usulan mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UU yang berperspektif HAM	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
02	Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia		5.430,0	0,0	0,0	0,0	5.430,0	
	Prosentase instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	BLK	174,0	0,0	0,0	0,0	174,0	
			174,0	0,0	0,0	0,0	174,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti diklat TOT terkait HAM	BLK	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
			1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan diseminasi HAM	BLK	2.312,5	0,0	0,0	0,0	2.312,5	
			2.312,5	0,0	0,0	0,0	2.312,5	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah materi kampanye publik tentang HAM	BLK	1.428,4	0,0	0,0	0,0	1.428,4	
			1.428,4	0,0	0,0	0,0	1.428,4	Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
	Jumlah penyusunan kurikulum pendidikan HAM	BLK	167,1	0,0	0,0	0,0	167,1	
			167,1	0,0	0,0	0,0	167,1	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah kerjasama di bidang pemajuan HAM dengan institusi/lembaga lain	BLK	348,0	0,0	0,0	0,0	348,0	
			348,0	0,0	0,0	0,0	348,0	Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			**7.430,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.430,0**	

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,01 Juni 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki

NIP:195907181986031001

Menolak negara lemah dgn melakukan reformasi sistem penegakan hukum yg bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
4. Kegiatan : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
5. Unit Organisasi : Biro Dukungan Penegakan HAM

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO	Sasaran Kegiatan(Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)	Dimensi	Bidang	Nawacita	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM			9.816,0			04	—
		Jumlah kasus pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM yang diselesaikan	76					
02	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses mediasi			2.098,1				—
		Jumlah rekomendasi dan kesepakatan sengketa HAM melalui proses Mediasi	48					
03	Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM			1.605,9				—
		Jumlah penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM	7500					
Jumlah				13.520,0				

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM			9.816,0				0,0	0,0	0,0
	Jumlah kasus pelanggaran ham berat yang diselesaikan	3	911,7	2.735,0						
	Jumlah kasus yang dipantau, diselidiki dalam rangka perlindungan kelompok marginal dan rentan	25	118,8	2.970,0						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan penyelidikan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L atau pihak yang relevan	3850	0,9	3.288,6						
	Jumlah kasus yang diberikan amicus curiae dalam kasus pelanggaran HAM	7	10,2	71,7						

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Jumlah kasus yang diselidiki dalam rangka pemenuhan hak konstitusional WN dalam pemiliu legilatif/pilkada	24	31,3	750,7						
02	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses mediasi			2.098,1				0,0	0,0	0,0
	Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM	45	35,0	1.573,8						
	Jumlah hasil kesepakatan hasil mediasi	3	174,8	524,3						
03	Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM			1.605,9				0,0	0,0	0,0
	Jumlah pengaduan melalui sistem penanganan pengaduan (SPP/Complaining Handling System CHS)	7000	0,2	1.428,3						
	Jumlah pengaduan melalui perwakilan Komnas HAM	500	0,0	0,0						
	Jumlah tanggapan pengaduan yang bukan pelanggaran HAM	3650	0,0	177,6						
Jumlah				13.520,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

B. Sumber Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
01	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM		9.816,0	0,0	0,0	0,0	9.816,0	
	Jumlah kasus pelanggaran ham berat yang diselesaikan	BLK	2.735,0	0,0	0,0	0,0	2.735,0	
			2.735,0	0,0	0,0	0,0	2.735,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah kasus yang dipantau, diselidiki dalam rangka perlindungan kelompok marginal dan rentan	BLK	2.970,0	0,0	0,0	0,0	2.970,0	
			2.970,0	0,0	0,0	0,0	2.970,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan penyelidikan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L atau pihak yang relevan	BLK	3.288,6	0,0	0,0	0,0	3.288,6	
			3.288,6	0,0	0,0	0,0	3.288,6	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah kasus yang diberikan amicus curiae dalam kasus pelanggaran HAM	BLK	71,7	0,0	0,0	0,0	71,7	
			71,7	0,0	0,0	0,0	71,7	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah kasus yang diselidiki dalam rangka pemenuhan hak konstitusional WN dalam pemiliu legilatif/pilkada	BLK	750,7	0,0	0,0	0,0	750,7	
			750,7	0,0	0,0	0,0	750,7	Provinsi DKI Jakarta
02	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses mediasi		2.098,1	0,0	0,0	0,0	2.098,1	
	Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM	BLK	1.573,8	0,0	0,0	0,0	1.573,8	
			1.573,8	0,0	0,0	0,0	1.573,8	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah hasil kesepakatan hasil mediasi	BLK	524,3	0,0	0,0	0,0	524,3	
			524,3	0,0	0,0	0,0	524,3	Provinsi DKI Jakarta
03	Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM		1.605,9	0,0	0,0	0,0	1.605,9	
	Jumlah pengaduan melalui sistem penanganan pengaduan (SPP/Complaining Handling System CHS)	BLK	1.428,3	0,0	0,0	0,0	1.428,3	
			1.428,3	0,0	0,0	0,0	1.428,3	Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
	Jumlah pengaduan melalui perwakilan Komnas HAM	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah tanggapan pengaduan yang bukan pelanggaran HAM	BLK	177,6	0,0	0,0	0,0	177,6	
			177,6	0,0	0,0	0,0	177,6	Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			13.520,0	0,0	0,0	0,0	13.520,0	

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,01 Juni 2015

a/n Menteri/ Kepalá Lembaga

Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki

NIP:195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
4. Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
5. Unit Organisasi : Biro Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO	Sasaran Kegiatan(Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)	Dimensi	Bidang	Nawacita	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban			4.120,0				—
		Meningkatnya Penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik	1					
Jumlah				4.120,0				

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban			4.120,0				0,0	0,0	0,0
	Tersusunnya kertas kebijakan terkait rekomendasi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan per-UU	5	104,3	521,5						
	Tersusunnya konsep pengembangan mekanisme penanganan KTP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan SPPT-PKKTP	1	50,0	50,0						
	Terselenggaranya kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya	1	50,0	50,0						
	Terselenggaranya kebijakan untuk implementasi untuk kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan jender	1	50,0	50,0						
	Prosentase persebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP	20	5,0	100,0						
	Prosentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	20	10,0	200,0						

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Prosentase pengguna layanan resource center KtP	20	3,8	75,0						
	Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	1	450,0	450,0						
	Tersedianya dokumen laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pecarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan	5	75,0	375,0						
	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90	2,5	225,0						
	Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan	1	65,0	65,0						
	Meningkatnya penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik	1	1.173,0	1.173,0						
	Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi	60	8,9	532,8						
	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	50	5,1	252,7						
Jumlah				4.120,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

B. Sumber Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
01	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban		4.120,0	0,0	0,0	0,0	4.120,0	
	Tersusunnya kertas kebijakan terkait rekomendasi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan per-UU	BLK	521,5	0,0	0,0	0,0	521,5	
			521,5	0,0	0,0	0,0	521,5	Provinsi DKI Jakarta
	Tersusunnya konsep pengembangan mekanisme penanganan KTP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan SPPT-PKKTP	BLK	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
			50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	Provinsi DKI Jakarta
	Terselenggaranya kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya	BLK	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
			50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	Provinsi DKI Jakarta
	Terselenggaranya kebijakan untuk implementasi untuk kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan jender	BLK	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
			50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase persebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP	BLK	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
			100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase pengguna layanan resource center KtP	BLK	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	
			75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan	BLK	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
			450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	Provinsi DKI Jakarta
	Tersedianya dokumen laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pecarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan	BLK	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	
			375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	BLK	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	
			225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	Provinsi DKI Jakarta
	Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan	BLK	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	
			65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	Provinsi DKI Jakarta
	Meningkatnya penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik	BLK	1.173,0	0,0	0,0	0,0	1.173,0	
			1.173,0	0,0	0,0	0,0	1.173,0	Provinsi DKI Jakarta
	Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi	BLK	532,8	0,0	0,0	0,0	532,8	
			532,8	0,0	0,0	0,0	532,8	Provinsi DKI Jakarta
	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	BLK	252,7	0,0	0,0	0,0	252,7	
			252,7	0,0	0,0	0,0	252,7	Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			4.120,0	0,0	0,0	0,0	4.120,0	

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,01 Juni 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki

NIP.195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
3. Sasaran Program : 1.Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM
4. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama
5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO	Sasaran Kegiatan(Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)	Dimensi	Bidang	Nawacita	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama			3.070,0				—
		Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja anggaran, pengendalian internal dan evaluasi pelaporan, dokumen kerjasama dan tindak lanjut hasil putusan paripurna	50					
Jumlah				3.070,0				

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama			3.070,0				0,0	0,0	0,0
	Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain di lingkungan Komnas HAM	7	121,4	850,0						
	Jumlah calon anggota Komnas HAM yang diajukan ke DPR RI	1	400,0	400,0						
	Jumlah Laporan Audit, Reviu dan Evaluasi	4	67,5	270,0						
	Prosentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	15	6,7	100,0						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60	3,3	200,0						
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	200,0	200,0						
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi publik	4	50,0	200,0						

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Jumlah pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan melalui teknologi informasi (E-Gov)	1	350,0	350,0						
	Prosentase risalah persidangan hasil putusan paripurna yang dihasilkan	75	2,7	200,0						
	Prosentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	75	4,0	300,0						
Jumlah				3.070,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

B. Sumber Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
01	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan kerjasama		3.070,0	0,0	0,0	0,0	3.070,0	
	Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain di lingkungan Komnas HAM	BLK	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	
			850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah calon anggota Komnas HAM yang diajukan ke DPR RI	BLK	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	
			400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah Laporan Audit, Reviu dan Evaluasi	BLK	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	
			270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	BLK	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
			100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	Provinsi DKI Jakarta
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi publik	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan melalui teknologi informasi (E-Gov)	BLK	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	
			350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase risalah persidangan hasil putusan paripurna yang dihasilkan	BLK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	BLK	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
			300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			3.070,0	0,0	0,0	0,0	3.070,0	

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,01 Juni 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Jenderal



Untung Tri Basuki

NIP:195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
3. Sasaran Program : 1.Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM
4. Kegiatan : Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum
5. Unit Organisasi : Biro Umum
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO	Sasaran Kegiatan(Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2016	Alokasi 2016(Juta)	Dimensi	Bidang	Nawacita	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01	Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM			65.816,1				—
		Jumlah penyusunan dokumen dan kegiatan di bidang tata organisasi, administrasi dan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana	12					
Jumlah				65.816,1				

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
01	Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM			65.816,1				0,0	0,0	0,0
	Jumlah dokumen analisis kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian	2	249,9	499,8						
	Jumlah peraturan (penataan) kelembagaan yang dihasilkan	2	62,4	124,8						
	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	80	0,0	0,0						
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	1	300,0	300,0						
	Opini laporan keuangan	1	200,6	200,6						
	Jumlah dokumen keuangan	2	102,8	205,6						
	Jumlah konsultasi dan bantuan hukum yang dihasilkan	2	62,4	124,8						

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Tahun 2016			Prakiraan Maju					
		volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Jumlah jabatan fungsional yang terbentuk	3	0,0	0,0						
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjejangan/keahlian	20	37,7	753,3						
	Jumlah dokumen pengelolaan aset	1	100,1	100,1						
	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	70	36,1	2.526,1						
	Layanan Perkantoran	12	2.345,4	28.145,0						
	Belanja pegawai	13	2.525,8	32.836,0						
Jumlah				65.816,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

B. Sumber Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
01	Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM		65.816,1	0,0	0,0	0,0	65.816,1	
	Jumlah dokumen analisis kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian	BLK	499,8	0,0	0,0	0,0	499,8	
			499,8	0,0	0,0	0,0	499,8	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah peraturan (penataan) kelembagaan yang dihasilkan	BLK	124,8	0,0	0,0	0,0	124,8	
			124,8	0,0	0,0	0,0	124,8	Provinsi DKI Jakarta
	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	BLK	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
			300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	Provinsi DKI Jakarta
	Opini laporan keuangan	BLK	200,6	0,0	0,0	0,0	200,6	
			200,6	0,0	0,0	0,0	200,6	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah dokumen keuangan	BLK	205,6	0,0	0,0	0,0	205,6	
			205,6	0,0	0,0	0,0	205,6	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah konsultasi dan bantuan hukum yang dihasilkan	BLK	124,8	0,0	0,0	0,0	124,8	
			124,8	0,0	0,0	0,0	124,8	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah jabatan fungsional yang terbentuk	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjejangan/keahlian	BLK	753,3	0,0	0,0	0,0	753,3	
			753,3	0,0	0,0	0,0	753,3	Provinsi DKI Jakarta
	Jumlah dokumen pengelolaan aset	BLK	100,1	0,0	0,0	0,0	100,1	
			100,1	0,0	0,0	0,0	100,1	Provinsi DKI Jakarta
	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	BLK	2.526,1	0,0	0,0	0,0	2.526,1	

No	Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah	
			2.526,1	0,0	0,0	0,0	2.526,1	Provinsi DKI Jakarta
	Layanan Perkantoran	BLK	28.145,0	0,0	0,0	0,0	28.145,0	
			28.145,0	0,0	0,0	0,0	28.145,0	Provinsi DKI Jakarta
	Belanja pegawai	BLK	32.836,0	0,0	0,0	0,0	32.836,0	
			32.836,0	0,0	0,0	0,0	32.836,0	Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			65.816,1	0,0	0,0	0,0	65.816,1	

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,01 Juni 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Jenderal

Untung Tri Basuki
NIP.195907181986031001